



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

RENCANA KERJA TAHUN 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun 2023 dapat terselesaikan. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja perencanaan dalam periode 1 (Satu) Tahun kedepan. Selain itu Renja ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 1 (Satu) tahun yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2023 ini, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai penyelenggara penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 yakni dengan visi adalah **“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”**

Probolinggo, Desember 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Probolinggo**

PUJO AGUNG SATRIO,S,STP.,M.Si

- Pembina Utama Muda
NIP. 19780927 199802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	7
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah.....	17
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	35
3.1 Tugas dan Sasaran Perangkat Daerah.....	35
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023.....	36
3.3 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD tahun 2023	36
BAB IV PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 sebagai sebuah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo serta berpedoman pada RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019–2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019– 2024.

Dokumen RENJA ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo yang memuat maksud dan tujuan, visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dokumen RENJA ini sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD tahun 2023.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk dilaksanakan perubahan terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun 2023 seiring adanya perubahan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

Tatacara penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas :

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, yang terdiri atas :
 1. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, mencakup:
 - a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b) Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c) Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 2. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a) Pendahuluan;
 - b) Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d) Penutup
- b. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- c. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 Kota Probolinggo tahun 2023, adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 12) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 95).
 - 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
-

- 14) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
- 16) Perwali Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perwali Nomor 219 Tahun 2019 tentang IKU Pemerintah Kota Probolinggo dan PD di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- 17) Perwali Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023;
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun 2023;
- c. Sebagai tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Satuan Polisi Pamong Praja memuat sasaran staregis sesuai dengan RENSTRA, indikator kinerja utama, target yang akan dicapai pada tahun 2023, serta program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Capaian Renstra satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO

- 3.1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian PD Tahun 2023

Penyusunan Renja Satpol PP Kota Probolinggo Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas yang akan dilaksanakan;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun 2023 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023 ;
 - b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Realisasi fisik/kinerja Satpol PP Kota Probolinggo untuk tahun 2023 kinerja yang telah ditetapkan maka didukung melalui pelaksanaan program dan kegiatan beserta pendanaannya dari pagu anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 17.267.433.772,00** terealisasi sebesar **Rp. 15.991.642.355,00** atau sebesar **92,37%**. Dari hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat efisiensi dalam pendanaannya. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 selengkapnya dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel Realisasi Tahun 2023

urusan/Bidang urusan Pemerintan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
URUSAN PEMERINTAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
PROGRAM PENUNJANG urusan PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.633.095.659,00	8.319.087.926,00	96,36%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.787.900,00	58.520.150,00	97,88%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.787.900,00	52.520.150,00	97,64%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.104.645.921,00	6.845.519.733,00	96,35%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.530.400.721,00	6.274.701.551,00	96,08%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	124.482.000,00	122.862.000,00	98,70%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	449.763.200,00	447.956.182,00	99,60%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.577.500,00	12.352.100,00	50,26%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.577.500,00	12.352.100,00	50,26%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.370.250,00	555.072.898,00	97,66%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	384.058.500,00	371.150.050,00	96,64%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.613.300,00	22.466.300,00	99,35%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.090.000,00	13.090.000,00	100,00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.000.000,00	8.990.000,00	99,89%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.008.450,00	135.776.548,00	99,83%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.259.658,00	168.983.203,00	92,21%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.259.658,00	100.067.603,00	87,58%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.000.000,00	68.915.600,00	99,88%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.454.430,00	678.639.842,00	98,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	514.739.430,00	506.916.592,00	98,48%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	84.140.000,00	83.993.250,00	99,83%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.575.000,00	87.730.000,00	93,75%
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.040.862.783,00	7.057.454.179,00	87,77%
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.248.376.540,00	4.197.923.350,00	98,81%
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	482.600.000,00	463.015.000,00	95,94%
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	3.478.429.850,00	3.457.503.700,00	99,40%
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	36.426.000,00	35.430.960,00	97,27%
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	85.000.000,00	76.250.000,00	89,71%
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	149.590.690,00	149.493.690,00	99,94%
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.330.000,00	16.230.000,00	99,39%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.792.486.243,00	2.859.530.829,00	75,40%
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.946.717.843,00	1.615.093.560,00	82,96%

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.845.768.400,00	1.244.437.269,00	67,42%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	639.245.650,00	615.100.250,00	96,22%
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	528.545.650,00	504.450.250,00	95,44%
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	496.570.650,00	472.550.250,00	95,16%
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.725.000,00	19.675.000,00	99,75%
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12.250.000,00	12.225.000,00	99,80%
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50%
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	10.000.000,00	9.950.000,00	99,50%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100.700.000,00	100.700.000,00	100,00%
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.700.000,00	100.700.000,00	100,00%
Jumlah	17.313.204.092,00	15.991.642.355,00	92,37%

Tabel T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023 SATPOL PP KOTA PROBOLINGGO

Nama Perangkat Daerah :.....

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2021 s/d Tahun 2023)	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) tahun 2021 s/d 2023	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiat a n Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan Tw 2 tahun 2023		
								Target (Tahun 2022)	Realis asi (Tahu n 2022)	Tingk at Realis asi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan Tw 2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(kolom (5+7+9)	11=(kolom 10/9 x 100)
1				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (Tahun 2023)									
1	01			Bidang Urusan ketentraman Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat									
1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Program	90	90	90	90	1,00	90	270	300
1	01	01	01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	90	4	90	80	0,89	90	174	193
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	1,00	2	6	300

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	4	4	1,00	4	12	300
1	01	01	02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Keuangan Sesuai Ketentuan	100	100	100	100	1,00	100	300	300
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	60	12	15	1,25	60	135	225
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240	240	230	12	0,05	240	492	205
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15	15	12	80	6,67	15	110	733
1	01	01	03	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi kepegawaian PD Sesuai Ketentuan	80	80	80	80	1,00	80	240	300
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	240	240	220	85	0,39	218	543	249
1	01	01	04	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Administrasi Umum PD Sesuai Ketentuan	80	80	85	8	0,09	80	168	210

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	10	12	10	0,83	12	32	267
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	12	12	1,00	12	36	300
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10	10	10	12	1,20	10	32	320
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan	12	12	12	100	8,33	12	124	1033
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12	12	15	100	6,67	15	127	847
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	65	65	65	100	1,54	65	230	354
1	01	01	05	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Ketatalaksanaan yang terpenuhi	100	100	100	100	1,00	100	300	300
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	100	8,33	12	124	1033
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum yang Disediakan	12	12	12	80	6,67	12	104	867
1	01	01	06	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase BMD dalam kondisi baik	80	80	80	80	1,00	80	240	300

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	20	27	80	2,96	25	125	500
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	30	50	80	1,60	50	160	320
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana [prasaranan dan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	0	1		0,00	1	1	100
1	01	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	100	100	100		0,00	100	200	200
1	01	02	01	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	100	100	100	1094	10,94	100	1294	1294
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	jjumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	800	1094	360	12	0,03	600	1706	284

				Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	729	206	800	12	0,02	206	424	206
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat kab/kota	12	12	12	12	1,00	12	36	300
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12	12	12	221	18,42	12	245	2042
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah personil satpol pp yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	240	240	224	12	0,05	218	470	216
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	12	12	12	80	6,67	12	104	867
1	01	02	02	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	100	100	100	12	0,12	100	212	212

				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat /pelaku usaha	12	12	12	12	1,00	12	36	300
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	12	12	100	8,33	12	124	1033
1	01	03		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsif Time	60	100	60	100	1,67	60	260	433
1	01	03	01	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	5	5	100	5	0,05	5	15	300
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan kebakaran dalam daerah kab/kota	5	5	5	60	12,00	5	70	1400
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas pikit dan pemadaman kebakaran dalam daerah kab/kota	60	60	53	102	1,92	60	222	370
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	102	102	49	1281	26,14	102	1485	1456

1	01	03	02	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang di persyaratkan harus memiliki memiliki sistem proteksi kebakaran	109	1281	109	1281	11,75	109	2671	2450
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang di persyaratkan harus memiliki memiliki sistem proteksi kebakaran	109	1281	109	300	2,75	109	1690	1550
1	01	03	03	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan pengangulangan kebakaran	300	0	300	300	1,00	300	600	200
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan pengangulangan kebakaran	300	0	300	0	0,00	300	300	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang diterapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui kegiatan tahunan.

Kinerja tahunan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan dapat lebih terarah secara administrative dapat memenuhi persyaratan dan dapat dipertanggung jawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia. Dengan demikian perencanaan yang akan dilakukan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo tahun 2019–2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Pelanggaran Perda Turun
2. Peningkatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
4. Peningkatan Penyuluhan dan pembinaan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
5. Peningkatan Ketrampilan Satuan Linmas dalam Penanggulangan bencana dan siskamswakarasa;
6. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengawasan dan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada berarti Tingkat kesadaran masyarakat kota Probolinggo mendukung pelayanan Satpol PP dalam melaksanakan Tugas sebagai penegak Peraturan daerah.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Penanganan Kebakaran berarti anggota pemadam kebakaran kota Probolinggo dalam mengatasi dan merespon kejadian kebakaran di wilayah Kota Probolinggo sangat tanggap.

Capaian Renstra PD

Pengukuran tingkat capaian kinerja Satpol PP Kota Probolinggo tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Tingkat capaian kinerja Satpol PP tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran dapat diilustrasikan sebagai berikut:

a. Sasaran strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase Peningkatan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	14%	1,9%	13,57%

b. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Penanganan Kebakaran

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase Penanganan kebakaran yang ditangani sesuai responsif time	60%	100%	166%

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATPOL PP KOTA PROBOLINGGO

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi (IKU OPD)	Target SPM / standar nasional (bila ada)	IKK (bila ada)	Target Renstra PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase Peningkatan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada			12%	12%	14%	14%	16%	162,75%	13,57%	16%	17%	
2	Persentase Penanganan kebakaran yang ditangani sesuai responsif time			60%	60%	60%	60%	65%	166,67%	166%	65%	70%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Dalam perumusan isu-isu penting dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Probolinggo konteks perumusan isu strategis Satpol PP Kota Probolinggo akan meliputi beberapa runtutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Timur, telaah terhadap dokumen Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sampai dengan tujuan akhir didalam konteks laporan adalah melakukan Penentuan isu-isu Strategis Satpol PP Kota Probolinggo.

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Probolinggo dalam pelaksanaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum antara lain :

a. **Permasalahan pada Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Trantibum dan Kebakaran adalah:**

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban;
2. Kurang terpenuhinya jumlah SDM Aparatur Penegak Perda Perkada;
3. Semakin kuat pengaruh globalisasi di semua sektor dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan Trantibum;
4. Belum tersusunnya SOP sinergitas penyelesaian pelanggaran Perda Perkada
5. Masih rendahnya kualitas petugas damkar

b. **Solusi-solusi yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas adalah:**

Pada Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Trantibum dan Kebakaran adalah:

- Pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Perkada untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- Penguatan SDM Aparatur Penegakan Perda dan Perkada.
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak terkait.
- Pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelamatan pemadam kebakaran.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan ada usulan dari masyarakat untuk tahun perencanaan 2023.

Tabel C 32**Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo****Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja**

No.	Program/Kegiatan Tahun 2023	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan		
	Keg. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA				
	Sub Keg.Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			49.135.000	diadakan di kecamatan/kelurahan
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responisive Time		
	Keg.PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Sub Keg.Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			17.260.000	

Catatan : Memasukkan usulan musrenbang yang ditarik OPD (apabila tidak memiliki usulan musrenbang ditulis NIHIL)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, selain berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJMD tahun pertama, penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023. Keterkaitan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Nasional, adalah sebagai berikut:

Keterkaitan Tema RKP 2023 dengan Tema RKPD Kota Probolinggo 2023:

Tema RKP Tahun 2023:

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN

Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023:

“Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan jasa berbasis agro”

Tema RKPD Kota Probolinggo Tahun 2023:

“Peningkatan dan pemerataan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing”.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan telaah arah pembangunan Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo 2019-2024 maka ditetapkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian berdasarkan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut maka disusun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Setelah Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA Tahun 2022	
			SASARAN		Awal	Penyesuaian
1.	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum		Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban	2%	2%	2%
		Meningkatnya pengawasan	Persentase peningkatan	14%	19,53%	19,53%

		dan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada	Kepatuhan terhadap Perda dan Perkada			
2.	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana		Indeks Risiko Bencana	143	143	143
		Meningkatnya penanganan Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran yang ditangani sesuai responsif time	60%	100%	100%

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Besarnya dana indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2023 sebelum Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar **Rp. Rp. 17.007.024.972**

Dana sebesar Rp. **Rp. 17.007.024.972** tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran sesudah	lebih/kurang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		9.190.026.989	8.720.767.739	469.259.250
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	6.000.000	6.000.000	-
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.399.700	53.787.900	(44.388.200)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.992.432.301	6.654.523.501	337.908.800
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	98.320.000	124.482.000	(26.162.000)
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	416.146.500	413.312.500	2.834.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.990.500	24.577.500	9.413.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	532.408.500	384.158.500	148.250.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.473.800	22.613.300	(2.139.500)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.090.000	13.090.000	(1.000.000)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	3.600.000	(1.800.000)
	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000	9.000.000	(2.000.000)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.008.450	136.008.450	(6.000.000)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	113.732.687	114.259.658	(526.971)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.000.000	69.000.000	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	627.669.580	514.824.430	(112.845.150)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.980.000	67.140.000	(41.160.000)
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.575.000	110.390.000	(16.815.000)
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		3.888.227.200	7.685.066.933	(3.796.839.733)
Penanganan Gangguan Trantibum dalam 1 Daerah Kab / Kota	Pencegahan gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	301.914.000	411.100.000	(109.186.000)
	Penindakan atas Gangguan Trantibum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	3.241.635.000	3.194.134.000	(47.501.000)
	Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat	36.426.000	36.426.000	-
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Trantibum	32.242.200	85.000.000	(52.757.8000)
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa HAM	151.210.000	149.590.690	(1.619.310)
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	41.400.000	16.330.000	25.070.000
Penegakan Perda Kab / Kota dan Perbup / Perwali	Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup / Perwali	37.050.000	1.946.717.843	(1.909.667.843)
	Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perbup / Perwali	46.350.000	1.845.768.400	(1.799.418.400)
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		624.609.000	601.190.300	23.418.700
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kab / Kota	481.896.000	458.515.300	23.380.700
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	19.725.000	19.725.000	-

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12.250.000	12.250.000	-
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana dan Prasana Proteksi Kebakaran	10.000.000	10.000.000	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	100.738.000	100.700.000	38.000
Total		13.702.863.189	17.007.024.972	(3.304.161.783)

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perumusan rencana program dan kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Probolinggo dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Probolinggo yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Probolinggo sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja dari program tersebut menjadi tanggung jawab Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Probolinggo dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Probolinggo Tahun 2023 terdapat 3 Program 11 kegiatan dan 30 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Setiap sub kegiatan juga telah dirumuskan indikator kinerja sub kegiatan. Perumusan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Probolinggo yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Berikut Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengajaran tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi/Kabupaten/Kota Probolinggo**

Nama Perangkat Daerah : SATPOL PP

Lembar..... Dari.....

Kode		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output) Tahun 2023	Rencana Tahun P-APBD 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
		Bidang Urusan Ketenteraman, Keteribatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani							
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program minimal 80%	Satpol PP	90%	8.720.767.739	DAU		90%	8.959.743.489
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pencapaian kinerja kegiatan perangkat daerah		90%	59.787.900	DAU		90%	110.000.000
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah penyusunan DPA dan RKA		2 dokumen	6.000.000	DAU		2 dokumen	60.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian kinerja dan realisasi kinerja	Satpol PP	4 laporan	53.787.900	DAU		4 laporan	50.000.000
		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		100%	7.192.318.001	DAU		100%	7.501.898.801
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu		12 bulan	6.654.523.501	DAU		12 bulan	6.987.432.301

			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Persentase dokumen penatausahaan keuangan yang terverifikasi		230 dokumen	124.482.000	DAU		230 dokumen	98.320.000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun tepat waktu	Satpol PP	15 laporan	413.312.500	DAU		15 laporan	416.146.500
			Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan		80%	24.577.500	DAU		80%	100.000.000
			Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Persentase kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	Satpol PP	220 dokumen	24.577.500	DAU		220 dokumen	100.000.000
			Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah sesuai	Satpol PP		568.470.250	DAU			323.338.030
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terealisasi	Satpol PP	12 paket	384.158.500	DAU		12 paket	146.796.680
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase realisasi peralatan rumah tangga yang diadakan	Satpol PP	12 paket	22.613.300	DAU		12 paket	22.011.600
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang terealisasi	Satpol PP	10 paket	13.090.000	DAU		10 paket	13.932.500
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah realisasi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Satpol PP	12 dokumen	3.600.000	DAU		12 dokumen	3.600.000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase kunjungan tamu yang terfasilitas		15 laporan	9.000.000	DAU		15 laporan	7.000.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terpenuhi		65 laporan	136.008.450	DAU		65 laporan	129.997.250
			Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah	Persentase Kebutuhan Ketatalaksanaan yang Terpenuhi	Satpol P	80%	183.259.658	DAU		80%	167.732.658

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi		12 bulan	114.259.658	DAU		12 bulan	113.732.658
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase jasa pelayanan umum kantor yang terpenuhi	Satpol PP	12 laporan	69.000.000	DAU		12 laporan	54.000.000
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik		80%	692.354.430	DAU		80%	756.774.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam kondisi layak		25 unit	514.824.430	DAU		30 unit	600.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik		25 unit	67.140.000	DAU		30 unit	28.980.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dalam kondisi baik	Satpol PP	1 unit	110.390.000	DAU		1 unit	127.794.000
			PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan		100%	7.685.066.933	DAU		100%	8.031.278.200
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	Satpol pp	100%	3.892.580.690	DAU		100%	4.661.278.200
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah kegiatan pengamanan trantibum		360 kasus	411.100.000	DAU		360 kasus	400.000.000
			Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah penertiban non yustisi (unjuk rasa, Operasi PKL, Minuman beralkohol)		206 kasus	3.194.134.000	DAU		206 kasus	4.000.000.000
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat kab/kota	Jumlah kegiatan pengamanan terpadu anggota linmas sekota	Satpol P	12 dokumen	36.426.000	DAU		12 dokumen	36.426.000

			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen linmas sekota probolinggo		12 dokumen	85.000.000	DAU		12 dokumen	32.242.200
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah personil satpol pp yang mendapatkan peningkatan kapasitas SDM	Satpol P	223 orang	149.590.690	DAU		223 orang	151.210.000
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan kerjasama dengan jajaran samping dan OPD terkait trantibum		12 dokumen	16.330.000	DAU		12 dokumen	41.400.000
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penanganan gangguan trantibum yang terselesaikan	Satpol P	80%	3.792.486.243	DAU		80%	3.370.000.000
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perda dan perkada		12 laporan	1.946.717.843	DAU		12 laporan	1.700.000.000
			Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah pelanggar yang di kenai tipiring	Satpol PP	12 laporan	1.845.768.400	DAU		12 laporan	1.670.000.000
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan Kebakaran yang ditangani sesuai Responsive Time	Satpol P	60%	601.190.300	DAU		60%	624.609.000
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Satpol P	100%	490.490.300	DAU		100%	513.871.000
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM kebakaran		5 dokumen	458.515.300	DAU		5 dokumen	481.896.000
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah kab/kota	Jumlah penanganan kejadian kebakaran	Satpol P	60 kejadian	19.725.000	DAU		60 kejadian	19.725.000

			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non kebakaran	Jumlah korban kebakaran dan non kebakaran		102 dokumen	12.250.000	DAU		102 dokumen	12.250.000
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran	Satpol P	109 dokumen	10.000.000	DAU		109 dokumen	10.000.000
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	<i>Jumlah sarana prasarana proteksi kebakaran</i>		109 dokumen	10.000.000	DAU		109 dokumen	10.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan pengangulangan kebakaran	Satpol P	300 orang	100.700.000	DAU		300 orang	100.738.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi masyarakat	<i>Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan pengangulangan kebakaran</i>		300 orang	100.700.000	DAU		300 orang	100.738.000
							17.007.024.972				17.615.630.689

BAB V
PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan RENJA dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Dengan ditetapkannya RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan Penegakan Perda dan Pengendalian Trantibum terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
2. RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2023;
3. Diharapkan dengan tersusunnya RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam RENJA ini.

Probolinggo, Desember 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Probolinggo**


PUJO AGUNG SATRIO,S,STP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19780927 199802 1 001

